



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

---

## KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 487.22/06236

### TENTANG

### PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di lapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Unddang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

**4. Undang-Undang (2)**

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

**Peraturan Gubernur (3)**

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :800/00956 tanggal 31 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

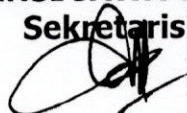
**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan.
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 4 Juli 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Sekretaris



**Drs. EKO SUPRAYITNO, MM**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  
 Nomor : 487.22/ 06236  
 Tanggal : 04 Juli 2020

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2020

I. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Informasi tentang Profil Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Tengah</b>						
a.	Kedudukan/domisili : Jl. Stadion selatan No. 1 Semarang Telp. 024. 8319421, 8415813, 8318846 Fax (024) 8318890 Web. bkd.jatengprov.go.id, email :bkd@jatengprov.go.id Twitter : @bkdjatengprov Facebook : Bkd Prov Jateng. Instagram: bkdprovjateng BKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pergub Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2017	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
b.	<b>VISI :</b> "Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Unggul" <b>MISI :</b> 1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan;	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2017	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>3. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur;</p> <p>4. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja;</p> <p>5. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai;</p> <p>6. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi;</p> <p>7. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian</p>						
<b>c.</b>	<p>Rencana Strategis (Rensta) Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 – 2018 merupakan Dokumen Rencana Strategis diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.</p>	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2017	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
<b>d.</b>	<p>Struktur Organisasi dan Profil Badan Kepegawaian Daerah</p>	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD

**Susunan Organisasi (6)**

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Susunan Organisasi BKD Prov. Jateng adalah sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Bidang Perenc dan pengemb Pegawai</li> <li>4. Bidang Mutasi</li> <li>5. Bidang Pembinaan &amp; Kesejahteraan Peg</li> <li>6. Bidang Informasi Kepegawaian</li> <li>7. UPT Kompetensi Peg</li> <li>8. Kelompok Jabatan Fungsional</li> </ol>						
e.	<p>Sumberdaya Manusia yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Total PNS : 161 S2 = 50, S1 = 73, D3 = 11 SLTA = 22 SLTP = 2 SD = 3</p>	Ka. BKD	Kasubbag Umpeg	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
f.	<p><b>Kedudukan, Tugas, Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng</b> <b>Kedudukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan merupakan Unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah;</li> <li>2. Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</li> </ol> <p><b>Tugas :</b> Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.</p>						

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;</li> <li>2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;</li> <li>4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; dan;</li> </ol>						

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan, 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.						
<b>g.</b>	<b>Profil Pejabat</b> Berisi daftar nama Pejabat	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
<b>h.</b>	<b>LHKPN</b> Berisi Laporan Harta Kekayaan Kepala BKD yang telah diverifikasi oleh KPK	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
<b>2.</b>	<b>Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah</b>						
<b>a.</b>	Nama Program dan Kegiatan,. Terdapat 4 Program yg terbagi 51 kegiatan yang dibiayai melalui APBD Prov. Jateng TA 2020	Ka. BKD	Sekretaris	2020	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
<b>b.</b>	Penanggung Jawab dan Pelaksana Program	Ka. BKD	Sekretaris	2020	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
<b>c.</b>	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Ka. BKD	Kasubag Program	2020	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
<b>d.</b>	Jadual Pelaksanaan Program Kegiatan	Ka. BKD	Kasubag Program	2020	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
<b>e.</b>	Nilai Anggaran	Ka. BKD	Kasubag Program	2020	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD
<b>f.</b>	<b>Agenda Penting BKD</b>						
	- Rencana Rakor, dll pada SKPD tahun berjalan	Ka. BKD	Kasubid Pengampu	2020	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
	- Rencana Pelaksanaan Diklat	Ka. BKD	Kasubid Pengampu	2020	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
	- Agenda Penting lainnya	Ka. BKD	Kasubid Pengampu	2020	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD

3. Hasil Pelaksanaan (9)



No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.</b>	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah						
<b>a.</b>	Ringkasan Informasi Kinerja Berisi progres target dan realisasi pelaksanaan kegiatan setiap bulannya TA 2020	Ka. BKD	Kasubag Program	2020	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
<b>b.</b>	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TA 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.	Ka. BKD	Kasubag Program	2019	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Website BKD
<b>4.</b>	Laporan Layanan Informasi Publik, Menguraikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik tahun 2019 maupun laporan bulanan akses pelayanan publik tahun 2019	Ka. BKD	Kasubag Program	2019	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun setelah ditetapkan	Meja Informasi
<b>5.</b>	Informasi peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh BKD	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	2020	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun setelah ditetapkan	Website BKD
<b>6.</b>	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa TA 2020	Ka. BKD	Kasubag Program	2020	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD & Papan pengumuman
	<b>1)</b> Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Ka. BKD	KPA	2020	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD & Papan pengumuman
	<b>2)</b> Pengumuman proses Pengadaan	Ka. BKD	KPA	2020	Soft Copy dan Hard Copy	2 Tahun	Website BKD & Papan pengumuman

**II. INFORMASI (10)**

**II. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT**

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian	Ka. BKD	Kasubag Umpeg	Setiap ada perubahan	Softcopy dan hard copy	Selama berlaku	Website BKD
b.	Rencana Strategis	Ka. BKD	Kasubag Program	Setiap Awal Periode	Softcopy dan hard copy	5 Tahun	Website BKD
c.	Rencana Kerja Tahunan	Ka. BKD	Kasubag Program	Setiap Awal Periode	Softcopy dan hard copy	2 Tahun	Website BKD
d.	Informasi Tes CPNS	Ka. BKD	Kepala Bidang Mutasi	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Papan Pengumuman
e.	Informasi UKKPI	Ka. BKD	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Papan Pengumuman
f.	Informasi Ujian Dinas	Ka. BKD	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Papan Pengumuman
g.	Uji Peningkatan Pendidikan	Ka. BKD	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Sesuai Kebijakan	Softcopy dan hard copy	Selama Berlaku	Website BKD dan Papan Pengumuman
h.	Informasi tentang Talent Scouting Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas, meliputi : Pengumuman, syarat dan ketentuan, tahapan, waktu dan hasil (talent Pool)	Kepala Badan	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Setiap Pelaksanaan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
i.	Informasi tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT, baik dipusat maupun didaerah, meliputi : Pengumuman, syarat dan ketentuan, tahapan, waktu, dan uraian jabatan yang akan diisi	Kepala Badan	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Setiap Pelaksanaan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD

**j. Informasi tentang Impassing (11)**

<b>j.</b>	Informasi tentang Inpassing/Penyesuaian Jabatan fungsional, meliputi : Pengumuman, syarat dan ketentuan, dan waktu pelaksanaan	Kepala Badan	Kabid Perenc & Pengem Pegawai	Setiap Pelaksanaa n	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website BKD
<b>h.</b>	Informasi Profil PNS	Ka. BKD	Kabid INKA	Setiap Tahun	Softcopy dan hard copy	5 Tahun	Website BKD

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 4 Juli 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris**



**Drs. EKO SUPRAYITNO, MM**